

GUS DUR DAN KEBUDAYAAN (REFLEKSI PENGALAMAN KESANTRIAN)

Syaiful Arif

Santri Pesantren Ciganjur
Penulis buku *Gus Dur dan Ilmu
Sosial Transformatif*
(Koekoesan, 2009)
dan *Refilosofi Kebudayaan,
Pergeseran Pascastruktural*
(Arruz, 2010)



Sebagai santri, pada suatu hari saya sowan ke Gus Dur untuk menyerahkan naskah buku tentang pemikiran beliau. Buku bertajuk *Gus Dur dan Ilmu Sosial Transformatif* yang diterbitkan pada Juli 2009 itu adalah rahim tempat buku-buku selanjutnya lahir.

Hari itu, dengan bersemangat saya berujar, "Pak Yai, ini naskah pemikiran *jenengan* sudah selesai. Naskah buku ini saya tulis selama empat tahun, saya belain sampai tidak kuliah lho." Saya serahkan bundelan naskah itu, dan sembari menimang naskah tersebut, Gus Dur berkata, "Bagus itu. Yang penting Anda tambah pintar. Kuliah di negeri ini apa? Mutunya tak jelas." Serentak beberapa teman santri dan pengasuh Pesantren Ciganjur tertawa. Saya yang memang malas kuliah mendapat *support* dari Sang Guru untuk tidak kuliah!

Sesaat saya tercenung, bukan kare-

na bangga mendapat *support* untuk tidak sekolah, tetapi berdetak yakin bahwa Gus Dur-ku itu memang tak butuh apa-apa untuk berbuat segala, termasuk tak butuh sekolah. Selekas kemudian ingat kelokan sejarah saat Gus Dur sering bolos kuliah di Mesir dan Baghdad. Untuk apa? Selain nonton bioskop dengan karibnya, Gus Mus, seperti kebanyakan pemikir besar, ia tidur di perpustakaan. Kita tak asing dengan kisah Gus Dur yang baca buku di perpustakaan dunia, sejak perpustakaan terbit hingga terbenam. Bagi saya, Gus Dur tak butuh apa-apa untuk memberikan dirinya kepada dunia, juga kepada kemanusiaan. Gus Dur tak butuh jadi doktor, tak butuh jabatan pemerintah, meski di akhir masa, ia sepertinya butuh menjadi presiden lagi. Satu hal yang amat saya sayangkan.

Sampai ketika buku ketiga saya terbit, bertajuk *Refilosofi Kebudayaan, Pergeseran Pascastruktural*, Gus Dur-

seran Pascastruktural (Arruz, 2010), pemikiran Gus Dur adalah lautan inspirasi, tempat gagasan-gagasan besar lahir. Ada tiga pencerahan yang saya alami, dalam ketiga buku yang tertulis, yang lahir dari percik pemikiran Sang Guru ini. *Pertama*, kemanusiaan yang tak berlandas apapun, selain manusia itu sendiri. Pencerahan ini saya dapatkan ketika menulis *Gus Dur dan Ilmu Sosial Transformatif* (2009). Kata Gus Dur, pembebasan yang sejati adalah pembebasan yang tanpa landasan apapun, kecuali manusia itu sendiri. Inilah yang saya sebut pembebasan “tanpa Marx”. Suatu pembebasan yang Gus Dur gerakkan, menerobos tembok-tembok ideologis, bahkan atas tembok ideologi pembebasan itu sendiri, yang sering terujuk pada Marxisme.

Gus Dur, pada level pemikiran sosialnya, telah melakukan kritik ideologi, dan oleh karenanya, ingin melakukan pembebasan diri dari “ketertutupan pemikiran” yang memenjara kemanusiaan. Dengan cantik ia menyebut kalangan ideologis ini dengan sebutan “kiri kekanak-kanakan”. Sebuah sebutan yang ia pinjam dari Lenin atas gerakan sosial yang mengklaim bahwa dirinya-lah yang paling benar. Yang tidak berideologi pembebasan, tidak membebaskan! Maka, pembebasan yang sejati adalah pembebasan kemanusiaan minus landasan tertutup dan sekat-sekat kelompok yang membatasi kemanusiaan itu sendiri. Tentu, ide seperti ini cenderung sulit diterapkan, khususnya pada konteks pergerakan sosial di Indonesia yang sering bersifat kelompok, bukan relasi

rasional dalam suatu ruang publik, lintas sekat nilai-nilai partikular.

Kedua, pengkajian Islam sebagai pengkajian kebudayaan. Ini saya temukan, dan akhirnya melahirkan buku, *Deradikalisasi Islam, Paradigma dan Strategi Islam Kultural* (Koekoesan, 2010). Buku ini adalah “catatan kaki” dari ide besar Gus Dur dalam Pribumisasi Islam. Ide ini, seperti kita tahu, adalah pewartaan antropologis bahwa Islam di Indonesia telah membumikan simbolnya ke dalam pangkalan kultural kebudayaan Nusantara.

Dalam buku itu saya menteorikan “yang budaya” dan “yang politik” dalam gerakan Islam. Gus Dur sering menyebutnya sebagai pendekatan budaya dan pendekatan institusional dalam Islam. Pendekatan budaya adalah NU, karena ia tak butuh institusi (politik) dalam berdakwah. Pendekatan institusional adalah Islam kanan yang membutuhkan negara untuk menegarkan nilai-nilai Islam. Saya jatuh cinta dengan gagasannya: perwujudan kultural Islam. Dalam Pesantren Sebagai Subkultur, Gus Dur menyatakan:

“Karena hakikat pesantren sebagai titik mula proses transformasi, dengan sendirinya pesantren dipaksa oleh keadaan menjadi alternatif terhadap pola kehidupan yang ada. Peranan sebagai pilihan ideal ini sangat sesuai dengan perwujudan kultural agama Islam yang sampai ke Kepulauan Nusantara. Sebagaimana dapat disimpul-

kan dari sejarah penyebaran Islam di kawasan ini, perwujudan kultural Islam adalah perpaduan antara doktrin-doktrin formal Islam dan kultus para wali (yang berpuncak pada kultus Walisongo), sebagai sisa pengaruh pemujaan orang-orang suci (*hermits*) dalam agama Hindu. Perwujudan kultural ini tampak nyata sekali dalam asketisme (*az-zuhud*, sering kali dinamai pula kealiman di negeri ini) yang mewarnai kehidupan agama Islam di Kepulauan Nusantara, tidak sebagaimana di negeri Arab sendiri sepanjang sejarahnya”.¹

Tentu, pesantren adalah manifestasi dari perwujudan kultural Islam itu sendiri. Meminjam Geertz, ia bisa tertahbis sebagai sistem budaya (*cultural system*). Kenapa? Karena pesantren merupakan strukturalisasi sosial atas sistem nilai di dalam berbagai simbol yang bersifat publik. Dengan simbol itu, warga pesantren memaknai hidup dan merayakan makna secara bersama, karena simbol tersebut dijaga oleh struktur sosial yang mapan. Bagi saya, perwujudan kultural Islam adalah tuah-cerah yang membuat saya bisa melihat keseharian keislaman di kampung, di musholla, pada barzanjian, tahlilan, cium tangan kiai, dzikir, ziarah, Menara Kudus, dan segenap laku kultural keislaman kita yang telah mengakar di relung keseharian, sebagai “penam-

pakkan teoritis” yang menyedia selaksa makna untuk digali berdasar teori-teori budaya kontemporer.

Ketiga, kebudayaan sebagai kehidupan sosial manusiawi (*human social life*). Ide Gus Dur inilah yang menjadi rahim bagi buku ketiga, *Refilosofi Kebudayaan* (2010). Ide ini, seperti kita tahu, adalah gagasan besar yang searah dengan tradisi filsafat kebudayaan. Dalam terang tradisi ini, kebudayaan terhakikatkan sebagai humanisasi: *man humanizes himself in humanizing the world around him*. Manusia memanusiakan dirinya melalui pemanusiaan kehidupan. Inilah hakikat kebudayaan.

Gus Dur secara eksplisit juga mendefinisikan kebudayaan seperti ini. Tuturnya:

Jika mengetahui kebenaran adalah kebutuhan kodrati, maka sistem pendidikan yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan itu adalah kebudayaan. Sehingga, jika sistem tersebut malah menjauhkan peserta didik dari pengetahuan kebenaran, krisis pendidikan secara sah menjadi krisis kebudayaan. Jika makan adalah kodrat manusia, maka sistem ekonomi yang dibangun untuk menjunjung kodrat itu adalah kebudayaan. Jadi, jika sistem ekonomi tersebut malah menghalangi orang untuk makan, krisis ekonomi secara sah

¹ Abdurrahman Wahid, *Pesantren Sebagai Sub-Kultur, dalam Menggerakkan Tradisi*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), him. 12

menjadi krisis kebudayaan. Pencarian solusi atas krisis ekonomi tidak bisa terpisah dari pencarian solusi atas krisis kemanusiaan.²

Dari sini Gus Dur tidak melihat kebudayaan sebatas warisan yang diwariskan, meskipun ia tetap mengamini pentingnya tradisi. Sebab, dalam tradisinya nilai-nilai suatu masyarakat terjaga. Tradisi harus dijaga, karena di dalamnya nilai-nilai terjaga. Gus Dur menolak definisi kebudayaan sebagai warisan, karena ia menolak fetisisme kebudayaan, yakni sebuah kondisi ketika kebudayaan yang berisi dan tergerak dalam nilai, telah "menjadi benda" tanpa makna. Fetisisme ini terjadi dalam pemahaman kita bahwa kebudayaan adalah artefak warisan leluhur yang harus dijaga kelestariannya. Kebudayaan adalah karya seni yang dinikmati dan dijual dalam pameran pariwisata. Kebudayaan oleh karenanya bisa didepartemenkan. Kebudayaan akhirnya harus dikelola oleh negara.

Inilah yang bermasalah bagi Gus Dur, karena baginya negara dan kebudayaan memiliki ranah yang bersifat oposisional. Negara terbentuk oleh hasrat menguasai, dengan gerak utamanya

yang mengacu pada kekuasaan. Sementara kebudayaan adalah kehidupan manusiawi yang digerakkan oleh budi. Bagaimana mungkin logika menguasai bisa mengatur logika pemanusiaan budi? Maka, konsekuensi logis dari kebudayaan *as human social life* adalah pemisahan kebudayaan dari negara. Kebudayaan harus dipisahkan dari negara, karena ia adalah "lingkaran besar", supra-sektor yang menaungi segenap sub-sektor kehidupan. Kebudayaan menjadi supra-sektor karena ia merupakan garis merah humanitas, sehingga segenap sektor hidup harus berada di dalamnya, dan taat kepadanya. Inilah yang oleh Mochtar Pabottingi disebut sebagai otosentrisitas kebudayaan. Kebudayaan memiliki "pusat dalam dirinya sendiri", karena ia merupakan titik kemanusiaan, tempat segenap gerak hidup mengarah kepadanya.³

Terkait dengan tema ini, Gus Dur pernah menasihati saya. "Jika Anda ingin menjadi pengkaji budaya yang benar, Anda harus membaca setidaknya empat buku utama. Pertama, *Aera Eropa* karya Prof. Jan Romein. Buku ini berisi materi tentang peradaban Eropa sebagai penyimpangan dari pola umum

² Abdurrahman Wahid, *Negara dan Kebudayaan*, Makalah Kongres Kebudayaan, Jakarta, 3 November 1991, hlm. 4

³ Dalam pengajian rutin Sabtu pagi, saya tanyakan hal ini. "Pak Yai, jika pada ranah pemikiran, *jenengan* hendak memisahkan kebudayaan dari negara, berarti Departemen Kebudayaan perlukah dibubarkan?" Jawab beliau, "Lha iya, harus dibubarkan itu." "Terus, kenapa saat Yai jadi presiden tak dibubarkan?" "Wah, politik itu kompleks dek. Kalau makai bahasa kitab, persoalannya *murakkab*, hahaha." Ah, sebagai santrinya, saya tak bisa menyembunyikan rasa bahagia dengan cara menjawab Gus Dur yang seperti itu. Berkelakar namun penuh spirit. Mengajarkan kebajikan sekaligus mengkader. Demikianlah pendidikan Gus Dur. Pengajian itu sendiri adalah pengajian rutin setiap Sabtu pagi sebelum beliau talkshow di Radio 68H. Sejak 2005 hingga wafat, pengajian tersebut rutin mingguan. Santri yang membaca kitab, Gus Dur menjelaskan pada level sosio-politik. Sebelumnya, yakni sejak Pesantren Ciganjur buka (2003) hingga 2005, pengajian kitab dengan Gus Dur bersifat setahun sekali setiap Ramadhan dan sebulan sekali dalam bentuk bedah buku.

dunia (*Algemeen manseljik patroon*). Eropa menurut Prof. Romein adalah penyimpangan dari pola umum dunia abad ke-5 SM. Satu masa ketika Timur mencapai puncak peradaban yang bersifat spiritual. Dengan buku ini, kita akan mengetahui bagaimana Eropa bisa maju, dan kenapa ia disebut sebagai satu penyimpangan. Kedua, Budhisme. Anda harus baca buku ini, karena ia mengajarkan persoalan penting bagi kita, yakni peniadaan diri. Di al-Hikam karya Ibn Atha'illah, peniadaan diri ini juga ada, di hikmah yang paling saya suka: *idfin wijudaka fil ardliil khumuli* (pendamlah dirimu dalam bumi kekosongan).

Ketiga, *Also sprach Zarathustra* karya Nietzsche. Dengan buku ini, Anda akan belajar tentang totalitas kreatif dari manusia. *Ubermensch*, manusia super. Yakni manusia yang memiliki kehendak berkuasa. Berkuasa atas capaian kebenaran, sehingga ia tak berhenti pada satu titik, namun selalu mengembara dalam pencarian kebenaran tak berujung. Keempat, *The Revolt of the Masses* karya Ortega Y. Gasset. Dalam buku ini, kita akan membaca kritik sang penulis atas karakter masyarakat modern yang ia sebut sebagai "masyarakat massa", yakni sebuah kondisi saat teknologi, rasionalitas, dan kemajuan material telah memberangus aspek reflektif dalam kehidupan kita. Jadi, seseorang tidak dikatakan budayawan kalau belum membaca keempat buku ini".⁴

Nasihat Gus Dur memang searah dengan pemahaman saya akan kebudayaan. Selayak Hegel, (pemahaman) kebudayaan haruslah memuat (kesadaran akan) krisis kebudayaan. Dari kesadaran akan krisis inilah, lahir kritik kebudayaan. Buku-buku yang direkomendasikan Gus Dur untuk dibaca tersebut, adalah buku tentang kritik kebudayaan. *The Revolt of the Masses*, *Aera Eropa*, dan pemikiran kebudayaan Nietzsche adalah pola pemikiran yang sadar akan situasi krisis, sehingga terlontarlah kritik.

Nietzsche, misalnya, melakukan kritik dalam pemilahnannya atas tiga corak kebudayaan kita. *Pertama*, kebudayaan bar-bar yang mengacu pada cara hidup kebinatangan, karena manusia tak mampu mengatasi diri. Selayaknya, model kebudayaan ini teralamat pada peradaban modern yang telah menghilangkan kesempatan reflektif, sehingga manusia bahkan menjadi mesin dari teknologi yang ia ciptakan. *Kedua*, kebudayaan normal dimana manusia mencari kebahagiaan. Kualitas hidup bahagia ini disebut normal karena ia memiliki kualitas biasa-biasa saja, yang olehnya terbedakan dengan bentuk ketiga, yakni kebudayaan asketik. Dalam corak ini, manusia menjadi manusia, karena ia mampu melewati aras kebinatangan, guna menjelma *Ubermensch*, manusia yang mampu menggerakkan kehendak untuk berkuasa.

Ubermensch dikatakan asketik kare-

⁴ Sebenarnya, ada lima buku yang direkomendasikan Gus Dur untuk dibaca, namun beliau lupa satu judul buku. Jadi, terpaksa penulis sebut empat buku saja yang beliau ingat.

na ia mengacu pada kemampuan manusia untuk mengatasi hambatan, baik dari dalam maupun luar diri. Hidup adalah kehendak untuk menguasai ketakutan, keraguan, dan juga keyakinan serta kebenaran yang dipaksakan dari luar diri, seperti otoritas agama, moral, pengetahuan, dan negara. Kebudayaan asketik mengacu pada gerak ini, dimana manusia bisa disebut manusia, ketika ia berani mengarungi samudera nihilisme tak terbatas, menggali mutiara kebenaran dari dan oleh diri, melalui pembongkaran terhadap penyuntikan kebenaran dari luar diri. Pada titik inilah peradaban modern menjadi keadaan bar-bar non-manusiawi, karena ia telah menjelma "tuhan-tuhan" baru atas nama rasionalisme dan konsumerisme. Satu hal yang kontradiktif, sebab bahkan sejak dalam iman, kesadaran, dan agama, Tuhan yang menjadi pusat kenyamanan diri telah mati, dibunuh oleh formalisme keagamaan itu sendiri.⁵

Hal sama pada buku *The Revolt of the Masses* yang lahir dari tradisi Kulturkritik. Tradisi ini yang melihat kemajuan modernitas sebagai gerak destruktif bagi "unsur halus" kemanusiaan adalah tradisi yang melihat kebudayaan sebagai gerak reflektif atas laju kebudayaan itu sendiri.⁶ Satu hal yang terjadi pada

pemikiran Prof. Romein yang melihat kemajuan Eropa, bahkan sebagai penyimpangan dari pola umum dunia sebelum *Renaissance* yang mengacu pada spiritualitas peradaban Timur.⁷ Tentu, Gus Dur tidak hendak mengajak santrinya untuk menjadi kaum fundamentalis yang menolak modernitas. Pemilihan buku-buku ini sebagai standar "keutamaan kebudayaan" adalah satu tesa bahwa pada ranah kebudayaan manusia harus merefleksikan seluruh gerak-capaian hidupnya, agar tidak melenceng dari cita-dasar kehidupan itu sendiri. Inilah yang membuat Gus Dur juga merekomendasikan pembacaan atas budhisme. Kenapa? Karena melampaui ruang formal keagamaan Buddha, budhisme adalah tradisi filosofis yang terbukti mampu memaksimalkan "teknologi internal" manusia melalui penggaliannya atas "yang spiritual" dalam hidup.⁸ Gerak kebudayaan mestilah mengacu pada aras spiritual ini, agar laju kehidupan tidak terjebak pada materi, lalu membatukan kebudayaan dalam capaian hidup yang jauh dari dimensi-isi yang kekal tersebut.

Tradisi kritik kebudayaan yang lahir dari pembelaan atas "unsur halus" manusia inilah yang akan merawat gerak dinamis kebudayaan. Hal ini terjadi se-

⁵ Lihat St. Sunardi, *Nietzsche* (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. 51-156

⁶ Lihat Ortega Y. Gasset, *The Revolt of the Masses* (London: George Allen & Unwin LTD, 1932), hlm. 85-107

⁷ Lihat Prof. J.M. Romein, *Aera Eropa, Peradaban Eropa sebagai Penyimpangan dari Pola Umum* (Bandung: Ganaco, 1956), hlm. 20-53

⁸ Lihat Nikkyo Niwano, *Buddhism for Today* (Tokyo: Kosei Publishing, 1983), hlm. 3-7

bab gerak kebudayaan mengacu pada apa yang oleh Simmel sebut sebagai perimbangan antagonistik. Yakni satu gerak dinamis yang tercipta dari pertemuan antara nilai dan sistem yang bersifat antagonis namun saling menyeimbangkan. Nilai atau "unsur halus" kemanusiaan itu adalah "isi" yang butuh dimaterialkan dalam bentuk sistem. Kenapa? Karena dalam sistem inilah nilai filosofis bisa terpraktikkan dalam realitas. Sementara itu, sistem atau materialisasi nilai butuh dikritisi oleh nilai, agar praktik nilai tidak menyimpang dari nilai dasar tersebut. Buku-buku yang direkomendasikan Gus Dur adalah "danau jernih" tempat kita merefleksikan ulang capaian kebudayaan yang cenderung memberangus nilai dasar kemanusiaan. Buku-buku itu adalah usaha untuk menjaga kewarasan kebudayaan, karena ia membuat hidup terus bergerak dalam re-orientasi dan re-kreasi. Satu hal yang menjadi gerak dinamis kebudayaan.

Pesantren Budaya

Sebagai santri, saya memang menemukan sosok Gus Dur yang kiai. Tentu, selayak tradisi NU, kiai amat dekat dengan tradisi sufi. Gus Dur yang mampu memendam diri dalam "bumi kekosongan" selayak kesukaannya terhadap hikmah al-Hikam seperti termaktub di atas memang memiliki kekosongan ini, yang membuatnya tak merasa kehilangan apapun ketika ia kehilangan dan ditinggalkan banyak pihak.

Saya masih ingat sebuah kisah dari adik kesayangan beliau Hasyim Wa-

hid (Pak Iim) pada sebuah diskusi yang hangat. Pada suatu hari, dalam detik-detik pelengseran kepresidenan ke-4 RI, Gus Dur disowani Pangdam Brawijaya, Djaja Suparman. Kata Pak Djaja, "Gus, saya ini menghadap bukan sebagai aparat *jenengan*, tetapi sebagai santri. Jika Gus Dur menghendaki, saat ini juga saya libas orang-orang yang hendak mengudeta *jenengan* itu." Tandas Pak Djaja berapi-api. Tetapi jawab Gus Dur, "Pak Djaja, kekuasaan tidak boleh dicari dan dipertahankan dengan kekerasan." Dengan jawaban seperti itu, maka Gus Dur pun "membiarkan" kudeta politis tetap berjalan, dan tanggallah kekuasaannya. Maka, sembari menitik air mata, Pak Djaja keluar dari istana dan menelpon Pak Iim, "Mas, Gus Dur kita itu, presiden biasa-biasa saja, penguasa yang bodoh, tetapi demokrat sejati." Tentu, Gus Dur adalah penguasa bodoh karena begitu saja membiarkan kekuasaannya digulingkan.

Hal sama dengan konsistensi Gus Dur dalam sikap anti-kekerasan. Karena, dalam Islam diperbolehkan melakukan perlawanan ketika seorang muslim dianiaya atau diusir dari rumahnya. Maka, Gus Dur tak membiarkan dirinya berada dalam situasi tersebut. Gus Dur tidak membiarkan dirinya terposisi sebagai orang yang dizalimi dan diusir dari rumahnya (istana kepresidenan), agar ia tak berhak melawan. Gus Dur yang saat itu masih presiden, meminta ajudannya untuk memintakan surat pindah rumah kepada Kelurahan Gambir. Karena ketika status Gus Dur pindah rumah maka

kiai *ushul fiqh* ini tidak boleh melakukan perlawanan kepada pihak yang mengusirnya dari istana. Dengan menggunakan hukum Islam, Gus Dur sengaja memosisikan dirinya untuk tidak berhak melakukan perlawanan, padahal secara *fiqhiyah*, ia sah untuk melawan karena dizalimi dan diusir dari rumahnya.

Di sini terlihat dua kebijaksanaan sekaligus. *Pertama*, kebijaksanaan *fiqhiyah* dimana Gus Dur taat dengan batasan hukum Islam. Tetapi, *kedua*, Gus Dur bahkan menggunakan aturan hukum Islam itu untuk “meniadakan dirinya”. Jadi Gus Dur telah mengamalkan dengan baik apa yang beliau sebut sebagai *fiqh*-sufistik, satu karakter keislaman khas pesantren. Gus Dur pada tataran luar-rasional taat dan menggunakan logika hukum. Tetapi, logika tersebut digunakan sebagai mekanisme yuridis bagi kelapangan batin yang merupakan samudera kebijaksanaan sufistik. Gus Dur yang dengan jelas-jelas diusir dari istana—karena tuduhan Bruneigate dan Buloggate tidak terbukti—malah menggunakan aturan *fiqh* pindah rumah agar ia tak berhak melakukan perlawanan. Jika tidak berangkat dari “pemendaman diri dalam bumi kekosongan”, presiden-kiai ini tidak akan mungkin melakukan hal tersebut.

Kerangka fikir inilah yang membuat Gus Dur menempatkan pesantren sebagai “yang budaya”. Artinya, model keislaman fikih-sufistik merupakan lambaran epistemologis bagi tergelarnya pesantren budaya yang secara spesifik Gus Dur arahkan pada spiritualitas. Hal

ini tampak pada simbolisasi pesantren dengan Gunung wayang. Kata Gus Dur, pola pesantren klasik selalu mengacu pada tata letak Gunung wayang. Asrama (ashrama, pertapaan) santri sebelah kiri adalah jejeran Kurawa, ndalem kiai, sebelah kanan adalah jajaran Pandawa, dan masjid yang berada di tengah adalah Medan Kurusetra, tempat Pandawa-Kurawa bertarung. Di sini, santri akan dikondisikan oleh kiai dalam pertarungan ruhani di masjid tersebut, sehingga santri sebagai penempuh perjalanan spiritual (*salik*) bisa mencapai kesempurnaan pandangan (*washil*) selayak kiai (Wahid, 2005).

Menarik, karena di Pesantren Ciganjur asuhannya Gus Dur menerapkan hal ini. Sejak akhir 2003, beliau mucal kitab di Masjid Munawwaroh dengan tahapan pengajian yang penuh dengan filosofi. Tahun pertama kitab yang dikaji adalah kitab nahwu *Qathr al-Nada*. Alasan beliau, sebelum merambah dunia ilmu seorang santri mesti menguasai bahasa, karena bahasa merupakan alat untuk mengarungi samudera keilmuan. Tahun kedua (2004), tasawuf dengan kitab *al-Hikam*. Setelah bahasa, santri mestilah mematangkan niat dan batinnya, karena tanpa kesadaran sufistik, maka perjalanan keilmuan hanya akan menjadi perjalanan tanpa akar-ruhani. Gus Dur memang memberangkatkan diri dari asketisisme intelektual, satu sikap dasar muslim pesantren yang menjadikan gerak pemikiran sebagai gerak ibadah.

Tahun ketiga (2005) kitab yang dikaji adalah kitab fikih *Bughyatul Mus-*

tarsyidin. Kitab ini adalah salah satu kitab favorit kiai NU. Gus Dur berulang kali mendedahkan penggunaan kitab ini oleh para kiai di Mukhtar NU Banjarmasin tahun 1935—ketika NU menyatakan wilayah Hindia-Belanda sebagai *dar al-shulh* (negeri damai). Penahbisan ini didasarkan pada kitab tersebut yang berdampak ditolaknya cita-cita Negara Islam di Indonesia, karena wilayah Nusantara bukanlah *dar al-Islam* tapi negeri muslim yang damai, di dalamnya umat bebas melaksanakan ibadah serta terdapatnya akar kesejarahan kerajaan Islam di Nusantara. Argumentasi Gus Dur dalam memilih kitab *Bughyatul Mustarsyidin* setelah kebahasaan dan hati adalah karena santri butuh mengenal korpus hukum Islam yang merupakan kekayaan tradisi Islam.

Di tahun keempat (2006) dan kelima (2007), ilmu yang diinstruksikan untuk dikaji santri adalah tafsir dan kalam. Tahun 2006 memuat *Tafsir al-Baidlawi* dan *Maqalah Islamiyyin*, dan tahun 2007 *Tafsir al-Mizan* dan *al-Ibanah 'an Ushul al-Diyana*. Di tahun ini dikaji pula kitab Mbah Hasyim Asy'ari yang memuat qanun asasi NU, yakni *Risalah Ahlussunnah wal Jamaah*. Pengkajian dua keilmuan ini menurut Gus Dur merupakan tahapan intelektualitas santri yang butuh menggarungi akar tradisi Islam, khususnya tradisi Islam Sunni. Jadi, setelah menguasai bahasa dan pematangan batin, santri

diarungkan samudera tradisi keislaman yang pokok dalam Sunni, yakni fikih, tafsir, dan kalam. Hingga di dua tahun terakhir (2008-2009), keilmuan yang direkomendasi Gus Dur untuk dikaji ialah *ushul fiqh*, melalui kitab *al-Risalah* (Imam Syafi'i) dan *al-Mustashfa* (Imam al-Ghazali). Pengkajian *ushul fiqh* vital, karena melaluinya seorang muslim bisa menyelami rasionalitas dalam Islam.⁹

Segegap tahapan pengajian kitab di atas adalah bagian utama dari tradisi Gus Dur, tradisi keislaman yang menghendaki terbentuknya kesempurnaan manusia (insan kamil). Bagi Gus Dur, untuk menjadi manusia, seorang muslim harus menjadi hamba yang “beres” hati dan akidahnya. Ini yang membuat pengajian setelah bahasa terfokus pada tasawuf dan kalam. Pendasaran batin ini penting, karena intelektualisme dalam Islam bukan rasionalisme sekular tapi suatu gerak transendental. Jika berpikir adalah ciri manusia yang membuatnya berbeda dengan binatang, maka dengan berpikir manusia harus menaikkan derajat kemanusiaannya, bukan hanya sebagai binatang berpikir tetapi hamba Tuhan yang berpikir demi fungsi kekhalifahan. Inilah asketisisme intelektual yang menempatkan proses pemikiran sebagai perjalanan spiritual (suluk).

Dari sini, ciri kemanusiaan Gus Dur kemudian tergerak dalam kemanusiaan itu sendiri. Artinya, ketika tradisi yang

⁹ Penjelasan tentang tahapan intelektual dari pemilihan kitab kuning pada pengajian Gus Dur penulis dapatkan dari pemangku Pesantren Ciganjur Kiai Muhammad Mustofa. Penjelasan ini ditekankan agar santri tidak memahami “kelas bersama Gus Dur” sebatas kelas akademik, tetapi lebih dari itu sebagai ajang pembentukan kemanusiaan yang ideal menurut Islam.

pertama adalah tradisi keagamaan, maka yang kedua merujuk pada kemanusiaan. Hamba yang matang batin-keyakinan-nya adalah hamba yang mengabdikan pada kemanusiaan. Karena salah satu manifestasi dari spiritualitas adalah penghargaan terhadap martabat kemanusiaan. Ini terjadi karena dalam Islam sendiri, perlindungan terhadap hak dasar manusia telah ditetapkan sebagai tujuan kemashlahatan (*ghayatul mashlahat*) yang merupakan tujuan utama syari'at (*maqashid al-syari'ah*). Tujuan ini berupa perlindungan terhadap hak hidup (*hifdz al-nafs*), hak berkeyakinan (*hifdz al-din*), hak berpikir (*hifdz al-'aql*), hak milik (*hifdz al-maal*), dan kesucian keluarga (*hifdz al-nasl*). Inilah satu tradisi Gus Dur lainnya, yakni pendasaran pemikiran Islam yang berlandaskan *maqashid al-syari'ah* (Wahid, 1987). Maka tak heran jika pemimpin NU tiga periode ini (1984-1998) menahbiskan fungsi Islam sebagai etika sosial.

Ya, Gus Dur adalah pemikir muslim yang menempatkan Islam terutama sebagai kritik-etik atas bangunan sosial yang timpang, baik oleh konstruk kapitalistik maupun struktur politik sewenang-wenang. Fungsi kritik-etik ini niscaya, dan beliau landaskan pada pola tradisi pesantren di Nusantara yang berperan sebagai sub-kultur, sub dari kultur mainstream yang berbeda dan oleh karenanya otonom, tetapi bisa mempe-

ngaruhi kultur mainstream tersebut. Watak sub-kultur inilah yang mampu menjadikan NU sebagai oposisi kultural atas hegemoni negara yang beliau praktikkan selama Orde Baru. NU era Gus Dur adalah NU oposisi, karena ia dengan cantik berusaha melakukan pengimbangan atas totalitarianisme negara. Salah satunya melalui penolakan pencalonan kepresidenan Soeharto pada Pemilu 1992 lewat peneguhan kesetiaan terhadap Pancasila di Rapat Akbar NU tahun 1991. Jadi, karena NU hanya setia pada Pancasila maka NU menolak pencalonan kembali Presiden Soeharto.¹⁰

Dalam kaitan ini, Pesantren Ciganjur asuhan beliau setidaknya telah menjadi pola dasar bagi tradisi Gus Dur tersebut. Pola dasar ini mengacu pada penekanan beliau atas tradisi asah-pemikiran, bukan semata legalitas lembaga pesantren. Karena Gus Dur telah terbiasa otodidak, maka para santrinya pun diarahkan ke sana: memaksimalkan energi belajar demi tergalinya kekuatan kemanusiaan. Artinya, Gus Dur adalah sosok yang tidak membutuhkan lembaga pendidikan formal untuk belajar. Pembelajaran beliau lebih digerakkan oleh niat yang luar biasa terhadap perjuangan kemanusiaan. Niat inilah yang melahirkan energi besar untuk belajar apapun, tanpa tergantung dengan lolohan kelas formal. Di pesantren ini, para santri diminta Gus Dur untuk "menenggelam-

¹⁰ Untuk perlawanan Gus Dur di era Orde Baru, lihat Syaiful Arif, *Gus Dur dan Ilmu Sosial Transformatif, Sebuah Biografi Intelektual* (Jakarta: Koekoesan, 2009)

kan diri” dalam buku. “Konco-konco jangan banyak buang waktu. Baca buku yang banyak saja.” Demikian tandas beliau. (Arif, 2009).

Warisan Nilai

Akhirnya, Gus Dur telah tiada. Meminjam judul tulisannya, beliau sekarang telah mendirikan “republik bumi di surga”.¹¹ Banyak warisan berharga yang bisa ditindaklanjuti, namun sayang masih terabaikan. Setidaknya, ada beberapa warisan Gus Dur, baik berupa gagasan, maupun niatan pembangunan kelembagaan yang berangkat dari perjuangan panjang yang telah beliau awali.

Pertama, pendirian Pusat Kajian Islam Tradisional (PKIT). Pusat kajian ini ingin Gus Dur dirikan di Ciganjur. “Nanti, kita datangkan para peneliti dari dalam maupun luar negeri. PKIT adalah Mekkahnya penelitian tradisi Islam di Indonesia. Para santri jadi asisten peneliti. Nah, buku-buku dan hasil penelitian peneliti tadi kita minta disimpan di Ciganjur, sehingga Anda semua bisa belajar dari literatur yang kaya”. Demikian ungkapan Gus Dur kepada para santri Ciganjur. Jadi, pada titik ini, pendirian Pesantren Ciganjur memang terkait erat dengan pendirian PKIT. Rencananya,

pusat kajian itu akan didirikan setelah Pesantren Ciganjur berusia sepuluh tahun. Pada usia itulah para santri telah mencapai kematangan awal sebagai peneliti. Sayang, baru tujuh tahun berjalan, pesantren telah ditinggalkan Sang Empu menghadap Ilahi.

Tentu kita mafhum kenapa Gus Dur ingin mendirikan PKIT. Selain berangkat dari pemilahan atas studi kawasan Islam di dunia yang ia gelar di suatu diskusi dengan Hassan Hanafi di Jepang pada dekade 1980-an, cita-cita ini juga berangkat dari paradigma tradisionalisme Islam yang menjadi karakter keislaman NU. Karena pada level pemikiran, Gus Dur menggagas suatu pribumisasi Islam, maka PKIT adalah pelembagaan bagi ide besar tersebut. Dari sini kita bisa melihat betapa bangga Gus Dur dengan tradisionalitas Islam Indonesia. Kebanggaan ini akhirnya melahirkan keyakinan saintifik bahwa tradisi tersebut bisa digali dan dikembangkan secara ilmiah dalam sebuah pusat studi profesional.

Kedua, sejak dekade 1990, Gus Dur telah menggagas perlunya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai peradilan banding konstitusi. Hal ini bisa terlihat dalam kritiknya atas institusionalisme demokrasi dan kecenderungan

¹¹ Di tulisan ini Gus Dur melakukan kritik atas bias paradigmatis dari gerakan sosial kiri yang menganggap gerakan keagamaan sebagai kontra-revolusi. Senyata, Gus Dur bahkan melihat adanya gerakan keagamaan berwawasan struktural, yakni gerakan sosial yang melandaskan kritisisme politiknya berdasar tradisi keagamaan. Hal ini Gus Dur lihat pada gerakan para teolog pembebasan Amerika Latin yang mengawinkan Katolikisme dengan Marxisme. Hasilnya, teologi pembebasan bukan gerak keagamaan formalis belaka, yang melakukan perbaikan sosial secara karikatif partikular. Ia merupakan gerakan yang menembakkan kritik ekonomi-politik berdasar tradisi keagamaan. Islam dalam visi Gus Dur bisa seperti itu, ketika agama ini mampu mendayagunakan potensi tradisi keagamaan yang tidak melulu bersifat integratif, tetapi transformatif. Lihat Abdurrahman Wahid, Republik Bumi di Sorga, Sisi Lain Motif Keagamaan di Kalangan Gerakan Masyarakat, *Prisma*, Oktober 1983.

state-oriented dari konstitusi. Pada era Orde Baru, Gus Dur melihat adanya "demokrasi seolah-olah", yakni sebuah situasi ketika praktik demokrasi hanya terhenti pada kelembagaan demokrasi minus demokratisasi pada ranah praksis politik. Hal ini dibarengi oleh pemahaman akan konstitusi yang sarwa-negara: konstitusi adalah payung legitimate bagi segenap kebijakan negara. Paradigma ini akhirnya bisa melahirkan penindasan negara atas nama konstitusi, sebab segenap kebijakannya tersahkan atas nama "yang suci". Dari sinilah Gus Dur meng-gagas perlunya MK yang berfungsi sebagai peradilan banding konstitusi. Jadi, peradilan ini merupakan ruang advokatif yang membela hak-hak warga dari penindasan konstitusional negara.¹² Kini, MK telah berdiri. Hanya saja, ruang geraknya masih terbatas pada proseduralisme hukum dan demokrasi, belum menjadi seperti yang Gus Dur sebut sebagai peradilan banding konstitusi. MK senafas cita-cita Gus Dur adalah lembaga tertinggi negara yang bukan menaungi negara melainkan menaungi rakyat dari kesewenangan negara. Untuk mewujudkan cita-cita Gus Dur ini maka perlu kajian serius terkait dengan penafsiran ulang posisi konstitusi dan MK dalam tata negara kita.

Dan banyak lagi warisan beliau, terkhusus pada ranah pemikiran. Gagasan-gagasan tentang pesantren sebagai sub-kultur adalah rambahan awal bagi tergalinya

antropologi pesantren yang memuat suatu teori budaya berdasar tradisi NU. Satu hal yang juga disediakan oleh gagasan pribumisasi Islam. Kedua pemikiran Gus Dur ini adalah ladang subur bagi pembentukan awal, suatu ilmu sosial perspektif NU. Hal ini penting, karena tradisi NU adalah selaksa makna yang amat produktif bagi kontekstualisasi paradigmatis atas bangunan ilmu sosial kontemporer yang butuh membumikan dirinya dalam ruang-waktu keindonesiaan. Gus Dur telah memulainya melalui pribumisasi ilmu sosial pada ranah pesantren, NU, dan Islam tradisional. Tentu itu baru pada level gagasan besar. Begitulah, Gus Dur telah mewariskan "paradigma ilmu sosial tradisional". Dan, tugas kita berikutnya adalah merumuskan dan melakukan sistematisasi pada level teori dan metodologi.

Dalam pemikiran Islam, Gus Dur juga mewariskan gagasan Islam sebagai etika sosial. Tentu, ide ini searah dengan teologi pembebasan di Katolik. Dalam ide ini, Gus Dur menekankan pentingnya pengarahannya *maqashid al-syari'ah* kepada perjuangan kemanusiaan yang mendasar. Jadi, ada PR besar yang membutuhkan "jembatan pemikiran" antara tradisi fikih dengan humanisme. Satu hal yang tidak selalu searah, karena keduanya memuat pula pergulatan nilai dan perbedaan dalam konteks dasarnya: fikih adalah hukum sementara humanisme adalah rasionalisme. Namun, Is-

¹² Abdurrahman Wahid, *Demokrasi, Sebuah Pertanggungjawaban*, Makalah Ketua Pokja Forum Demokrasi.

lam sebagai etika sosial ini penting untuk dirumuskan sebagai upaya revitalisasi terhadap tradisi NU dan membebaskan gerakan kader muda NU dari segregasi ideologis antara liberalisme dan konservatisme. Melalui Islam sebagai etika sosial, pemikiran Islam NU bisa menemukan kembali landasan dan arah filosofisnya yang terkait dengan keberpihakan terhadap rakyat bawah. Atau, meminjam istilah Gus Dur, menembakkan diri pada persoalan mendasar bangsa kita, yakni ketidakadilan struktural. Melalui gagasan ini, pemikiran NU tidak akan lagi mengalami "krisis ilmu sosial", sebuah situasi ketika landasan teoritis dan paradigmatis dari pemikiran Islam NU tidak dipertanyakan lagi. Melalui gagasan ini, pemikiran NU akan banyak bertemu dengan tradisi sosial kritis yang senantiasa merefleksikan idenya menuju pembaruan tiada henti. Inilah yang Gus Dur

sebut sebagai nilai hakiki kita itu, suatu perubahan sosial yang terus-menerus, dengan tetap berpijak pada tradisi.

Sebenarnya, masih teramat banyak warisan Gus Dur. Tulisan ini hanyalah sekelumit darinya. Gus Dur memang sosok yang unik, dan akan muncul banyak pemaknaan tentang dia. Gus Dur juga sosok yang dikagumi. Dari kekaguman itu diharapkan melahirkan penerus perjuangan Gus Dur. Maka, hadirilah Gus Dur-Gus Dur untuk zaman yang lain. Selayak sajak D. Zawawi Imron, Ode Buat Gus Dur (2009), "Matahari besok akan terbit, mengembangkan senyummu, lalu dilanjutkan oleh bibir bayi-bayi yang baru lahir. Merekalah nanti yang akan bangkit membetulkan arah sejarah. Selamat jalan, Gus Dur! Selamat berjumpa dengan orang-orang suci. Selamat berkumpul dengan para pahlawan. Karena engkau sendiri memang pahlawan". []